



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Alih Status Bimex, Anggota Dewan Desak Bentuk Pansus

Usin : Perlu Diaudit Kembali

RBI, BENGKULU - Dari Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin (15/6), sebanyak 8 Fraksi menyetujui pembahasan ketinggian selanjutnya, terhadap Raperda tentang perubahan status Badan Hukum Perusahaan Daerah Bimek menjadi perseroan daerah melalui virtual meeting, meski dengan ada beberapa catatan.

Diantara catatan yang diberikan 8 Fraksi dari rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Provinsi, H. Suharto SE, MBA, soal permintaan dilakukan audit investigatif terkait keuangan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut, dan dibahas dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus). Seperti disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi, H. Zainal S.Sos, M.Si yang meminta dengan disetujui pem-

bahasan Raperda perusahaan status hukum Bimek ini ketinggian selanjutnya, agar dapat dibentuk Pansus. Mengingat persoalannya masih banyak dan dinilai cukup rumit, karena amanah dari Perda No. 1 tahun 2020 tentang BUMD untuk merubah status perusahaan daerah, harus dalam kondisi sehat.

Sedangkan untuk mengetahuinya, minimal 2 tahun terakhir dilakukan audit oleh lembaga independen.

"Saran kita supaya salah satu BUMD itu terlebih dahulu dilakukan audit ulang, meski tahun 2015 lalu sudah dilakukan audit. Hal itu dilakukan agar kondisi perusahaan tersebut benar-benar dalam kondisi sehat dan jangan setelah statusnya berubah nanti justru bertambah tidak baik," kata Zainal.

Senada dengan itu, Ketua



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Alih Status Bimex, Anggota Dewan Desak Bentuk Pansus



Waka II DPRD Provinsi Bengkulu H. Suharto SE, M.BA.

Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (FPNI) DPRD Provinsi, Usin Abdisyah Putra Sembiring SH, MH juga mendesak untuk terlebih dahulu dilakukan audit. Sehingga ketika Bimek sudah berubah status menjadi perseroan

daerah, keberadaannya dapat menunjukkan kemajuan, dan akhirnya memberikan sumbangsih terhadap daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dari potensi aset yang dimiliki PD Bimex ini cukup

banyak, namun baru mampu memberikan PAD hanya sebesar Rp 15 juta. Makanya perlu diaudit, agar diketahui kondisi keuangan dan asetnya," tegas politisi Hanura ini.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi, Suharto menyatakan, dari catatan yang diberikan fraksi-fraksi itu agar dapat diperhatikan oleh Pemprov Bengkulu, khususnya terkait audit keuangan salah satu perusahaan daerah ini. Terlebih juga soal ketelitian dalam hal surat menyurat supaya dilaksanakan dan tidak bersifat copy paste lagi. Pasalnya, pihak legislatif masih menemukan kesalahan tulisan dalam Raperda perusahaan status hukum Bimex. "Harapan kita (DPRD Provinsi,red) juga kepada Direksi Bimex yang baru sekarang, untuk bekerja ekstra keras lagi, agar apa yang menjadi target sebelumnya bisa dicapai dengan baik ke depannya," tutup Suharto.(idn)